



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT KOMISI IX DPR RI**

---

Tahun Sidang	:	2016-2017
Masa Persidangan	:	I
Jenis rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	Kepala BNP2TKI
Rapat ke	:	32
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Senin, 3 Oktober 2016
Waktu	:	Pukul 14.00 WIB – selesai
Acara	:	1. Mendapatkan penjelasan terkait masalah perdagangan orang ke Malaysia, penyelesaian masalah hukum yang dialami TKI dan penjelasan terkait asuransi TKI korban PHK Group Bin Laden; 2. Penjelasan terkait calo dan TKI non formal; 3. Penjelasan terkait moratorium pengiriman TKI.
Ketua Rapat	:	Dede Yusuf. M.E, S.T, M.I.Pol/ Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Minarni, SH/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara 1 DPR/MPR-RI, Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	:	A. 25 orang dari 49 Anggota Komisi IX DPR RI; B. Kepala BNP2TKI beserta jajaran.

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) dibuka Ketua Rapat pada pukul 14.55 WIB dan setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1) dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kepala BNP2TKI untuk mengambil terobosan-terobosan baru terkait penyelesaian masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus pengiriman TKI ke Malaysia dan maraknya pengiriman TKI Non Prosedural ke Negara-negara Timur Tengah dengan upaya penguatan *crisis center dan early warning system*.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kepala BNP2TKI untuk segera menyelesaikan permasalahan hukum TKI yang bekerja di Malaysia dan Arab Saudi.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kepala BNP2TKI untuk mencari penyelesaian bagi TKI mantan karyawan Bin Laden yang masih menetap di Arab Saudi.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kepala BNP2TKI untuk bersinergi dengan pihak Kepolisian, Imigrasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan, Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Daerah untuk menindak tegas para calo pengiriman TKI Non Perosedural.
5. Komisi IX DPR RI akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan BNP2TKI, Dirjen Binapentasker Kementerian Ketenagakerjaan RI, Otoritas Jasa Keuangan dan Konsorsium Asuransi TKI terkait rendahnya penyelesaian klaim asuransi TKI.

**Rapat diakhiri pukul 16.55 WIB**

**KETUA RAPAT/  
KETUA KOMISI IX DPR RI,**



**DEDE YUSUF. M.E, S.T, M.I.Pol**  
A-415